

Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Tegal)

Nurul Mahmudah¹, Yusri Anis Faidah²

¹⁾⁻²⁾ Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal

email: nurul.mahmudah@poltektegal.ac.id

Article History

Received: 13/01/2025

Revised: 18/01/2025

Accepted: 31/01/2025

Keywords: *Community participation, accountability, transparency of public policies, human resource competency, use of information technology, quality of financial reports.*

This research aims to examine the influence of community participation, accountability, public policy transparency, Human Resource Competency, Use of Information Technology on the Quality of Tegal City Regional Government Financial Reports. This research is quantitative research using primary data through direct observation and questionnaires to respondents. The data analysis method uses multiple linear regression analysis with independent variables, namely community participation, accountability, public policy transparency, human resource competence, and use of information technology. Meanwhile, the dependent variable is the quality of financial reports. The population in this study were all employees in 37 OPDs in the Tegal City Government. This research is quantitative research that uses primary data from distributing questionnaires as a data source. The sample was determined based on purposive sampling techniques. The results of the research show that public participation has no partial effect on the quality of financial reports, accountability has a partial effect on the quality of financial reports, public policy transparency has no partial effect on the quality of financial reports, Human Resources competency has no partial effect on the quality of financial reports, utilization Information technology partially influences the quality of financial reports as well as public participation, accountability, transparency of public policies, Human Resources competence, and the use of information technology simultaneously influence the quality of financial reports.

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing di setiap negara juga menuntut daya saing di setiap pemerintah daerah, dimana daya saing pemerintah daerah ini diharapkan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan, Zayadi dalam (Hamsinar, 2022).

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya saat ini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik, baik di pusat maupun di daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan harus memenuhi prinsip-prinsip dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Yuliani, et.al.: 2016).

Badan pemeriksa keuangan menyarankan agar pemerintah daerah membuat rencana kegiatan untuk membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), karena laporan keuangan di daerah yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan pada dewan perwakilan rakyat daerah setahun sekali atau diakhir masa jabatannya. Namun dalam prakteknya, implementasi standar akuntansi pemerintah di lingkungan pemerintah tidaklah mudah, demikian pula yang terjadi di pemerintah daerah. Selain kesiapan pemerintah daerah yang masih kurang, juga disebabkan adanya peraturan di tingkat operasional dan rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah sudah pasti tidak dapat menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban yang wajar. Disisi lain, setiap kepala pemerintahan mengupayakan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas (Hamsinar, 2022).

Otonomi Daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Pemerintah Daerah dinyatakan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Sejak tahun 2001, atau sejak di berlakukannya Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Undang-undang No 32 Tahun 2004 bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Karyadi, 2016).

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pemegang amanah terhadap orang atau badan yang

meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas ini dilakukan sebagai bentuk transparansi daripada kegiatan operasional suatu perusahaan. Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengankan aspirasinya (Hamsinar, 2022).

Pelaksanaan otonomi daerah sudah berjalan sejak tahun 2004, akan tujuan utama dari otonomi daerah belum terpenuhi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, hal tersebut ditandai munculnya berbagai fenomena dalam perkembangan pemerintahan di Indonesia dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas terhadap pemerintah baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang membutuhkan. Pemerintah daerah merupakan daerah otonomi yang berhubungan langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah daerah ini lebih mengerti dan memahami aspirasi-aspirasi yang ada dalam masyarakat (Hamsinar, 2022).

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Mursyidi, 2009). Dengan demikian, tidak adanya laporan keuangan berkualitas menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Lebih lanjut lemahnya akuntabilitas dan transparansi tersebut mengindikasikan lemahnya sistem yang selanjutnya berimbas pada membudayanya korupsi sistematis. Untuk mengikis hal tersebut salah satu caranya adalah membudayakan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan instansi pemerintah daerah.

Tuntutan mengenai transparansi dan akuntabilitas publik dari semua aktivitas birokrasi sampai tahap pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta berbagai peraturan dan kebijakan pendukung lainnya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kinerja lembaga pemerintah. Upaya konkrit yang dilakukan pemerintah dalam hal mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (A. Rizka S, et.al. 2021).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa diperlukan percepatan perbaikan dari sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah melalui langkah-langkah nyata, terprogram dan mengikut sertakan berbagai kalangan tidak hanya dari pemerintah daerah saja yang hasilnya mendukung aparatur pemerintah daerah untuk membuat Laporan Keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang relevan, handal dan dapat dipercaya dihasilkan dari sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Saat ini sistem akuntansi pemerintah daerah rata-rata masih lemah, Mardiasmo, (2006) dalam (Hamsinar, 2022). Lemahnya transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu penyebab lemahnya sistem akuntansi pemerintah daerah. Saat ini akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan sering menjadi problem bagi daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum mampu memberikan kepuasan atau keyakinan terhadap masyarakat.

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah daerah agar laporan keuangan yang disampaikan dapat tepat waktu sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi tetap

bertahan pada opini WTP sebagai cerminan dari laporan keuangan yang berkualitas adalah dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang/individu baik dari pengetahuan, keterampilan dan perilaku untuk melakukan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu (A. Rizka S, et.al. 2021).

Pemerintah daerah dengan bantuan alat yang mendukung terlaksananya kegiatan atau pekerjaan seperti adanya perangkat keras komputer dan perangkat lunak lainnya akan mampu menyusun laporan keuangan dengan lebih efisien dan lebih tepat waktu. Rahman (2015) dalam (Wibowo, 2022) juga menyatakan bahwa tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan tepat waktu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

- a. Apakah Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- b. Apakah Akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- c. Apakah Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- d. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- e. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- f. Apakah Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Laporan Keuangan

Menurut PP No.71 Tahun 2010, Laporan Keuangan Pemerintah diartikan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan merupakan sesuatu unit pemerintahan yang terdiri dari satu ataupun sebagian entitas akuntansi ataupun entitas pelaporan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus melaporkan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan. Menurut Darise (2014) dalam (Wibowo, 2022). Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2016; No. 1) tujuan laporan keuangan adalah:

- a. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai.
- c. Laporan keuangan juga menunjukkan yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Dewi et al. (2020), partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan didalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Masyarakat selain sebagai penerima manfaat fasilitas juga merupakan subjek pembangunan yang berkesinambungan. Semakin tinggi partisipasi, maka semakin tinggi jumlah individu yang ikut terlibat di dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Semakin tinggi keterlibatan individu tersebut maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan, dan pembangunan menjadi semakin baik kedepannya.

Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus di penuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2011) akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang di percayakan pada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan secara periodik. Mardiasmo (2002) dalam Sujarweni (2015) mengatakan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ke pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Karyadi, 2018).

Transparansi Kebijakan Publik

Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, transparansi adalah keterbukaan publik dengan alasan bahwa publik berhak mendapatkan informasi secara terbuka dan menyeluruh tanggungjawab administrasi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Transparansi pemerintah dapat mendorong publik untuk ikutserta dalam kebijakan pemerintah. Dengan demikian, ada interaksi masyarakat dalam memantau dan menilai program pemerintah yang telah atau belum dilaksanakan dan dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. (Putri dan Akbar, 2022). Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Ledo, 2019)

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia

melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia adalah faktor yang sangat penting untuk pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya sebesar-besarnya. Bisa dikatakan juga sebagai pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi (Rifandi, 2019). Perencanaan sumber daya manusia terdiri dari kegiatan-kegiatan reaktif dan antisipatif melalui suatu organisasi untuk memastikan bahwa organisasi tersebut mempunyai jumlah dan macam orang pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memaksimalkan tujuantujuan pelayanan yang mana organisasi mempertinggi aktualisasi diri maupun kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan anggotanya serta memungkinkan pemanfaatan yang maksimal mengenai kecakapan-kecakapan maupun bakat dari para anggota Sunyoto dalam (Wibowo, 2022).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk mendapatkan, menyusun, memproses, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai macam untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Nurillah, 2014). Teknologi informasi merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi sehingga menjadi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Teknologi informasi meliputi komputer, perangkat lunak (*software*), database, jaringan, *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al, 2000) dalam (Wibowo, 2022).

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan diperlukan dalam sebuah organisasi atau instansi karena laporan keuangan adalah suatu alat yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan, sebagaimana yang disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010) yaitu, Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami (Wibowo, 2022).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang memandang fenomena/gejala itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, kongkrit, teramati, terukur, dan hubungan yang bersifat sebab akibat. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2022). Data primer merupakan data utama yang penulis gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini, yang di peroleh langsung dari sumber asli dan data di peroleh melalui survei kepada responden, dengan menyebarkan kuesioner kepada pihak-pihak yang berkaitan. Menurut Sugiyono (2017), “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Tegal. Jumlah SKPD Pemerintah Kota Tegal sebanyak 37 SKPD yang terdiri dari Sekretaris

Daerah, Inspektorat, 16 Dinas, 5 Badan, 10 Kantor, dan 4 Kecamatan. Sehingga populasi dalam penelitian ini sebanyak 256 pegawai. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel atau responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2022). Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pejabat struktural atau pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan pada Dinas, Badan dan Kantor Pemerintah Kota Tegal dan Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan. Sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 110 pegawai. Metode pengumpulan data dengan menggunakan observasi dan dokumentasi serta teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan spss dengan menggunakan alat uji statistik uji kualitas data, asumsi klasik, uji hipotesis, uji regresi berganda dan uji koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Pengujian uji validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik yaitu menghitung korelasi antara masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan menggunakan metode *product moment pearson correlation*. Data dinyatakan valid jika nilai r hitung yang merupakan nilai item dari *Corrected Item-Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%). Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa semua item/indikator dalam setiap variabel yang diujikan dinyatakan bahwa masing-masing item indikator pernyataan dinyatakan valid, hal ini karena nilai *Corrected Item- Total Correlation* > dari r tabel pada signifikansi 0,05 (5%).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari responden itu stabil dari waktu ke waktu. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel jika dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α), koefisien reliabilitas > 0,60.

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Partisipasi Masyarakat	0,849	0,60	Reliabel
Akuntabilitas	0,845	0,60	Reliabel
Transparansi Kebijakan Publik	0,877	0,60	Reliabel
Kompetensi SDM	0,798	0,60	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,884	0,60	Reliabel

Kualitas Laporan Keuangan	0,849	0,60	Reliabel
---------------------------	-------	------	----------

Sumber: Data Primer (2024), diolah SPSS

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kualitas Laporan Keuangan dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

A. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, serta uji heteroskedastisitas Interpretasinya ditunjukkan sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Untuk lebih memastikan apakah data residual terdistribusi secara normal atau tidak, maka uji statistik yang dapat dilakukan yaitu pengujian *one sample kolmogorov-smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05. Pengujian normalitas data juga dilakukan dengan menggunakan grafik yaitu histogram.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Standardized Residual
N		110
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.97679498
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.077
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.068 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data Olah SPSS

Berdasarkan tabel 2 hasil uji normalitas diatas dapat dilihat bahwa signifikansi nilai *Kolmogorov-smirnov* yang diatas tingkat kepercayaan 5% yaitu *alpha* 0,05 lebih kecil dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,068. Hal tersebut menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolonearitas adalah suatu kondisi hubungan linear antara variabel independen yang

satu dengan yang lainnya dalam model regresi. Salah satu untuk menguji adanya multikoloniaritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Jika nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikoloniaritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics Tolerance	Collinearity Statistics VIF
1	(Constant)		
	Partisipasi MAsyarakat	.071	14.048
	Akuntabilitas	.072	13.812
	Transparansi Kebijakan Publik	.582	1.719
	Kompetensi SDM	.485	2.060
	Pemanfaatan TI	.684	1.462

a. Dependent Variable: LK

Sumber: Data Olah SPSS

Berdasarkan tabel 3 hasil uji multikoloniaritas diatas bahwa nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil daripada 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikoloniaritas antar variabel independen.

3. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	-.783	.435
	Partisipasi MAsyarakat	.380	.705
	Akuntabilitas	.213	.832
	Transparansi Kebijakan Publik	.573	.568
	Kompetensi SDM	-.610	.543
	Pemanfaatan TI	-.489	.626

a. Dependent Variable: abres

Sumber: Data Olah SPSS

Berdasarkan tabel 4 hasil uji heterokedastisitas diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel lebih besar dari alpha 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala Heteroskedastisitas pada model regresi.

B. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a	
		Unstandardized Coefficients	
Model		B	Std. Error
1	(Constant)	31.470	6.401
	PM	-.793	.442
	AT	.961	.371
	TP	.260	.165
	SDM	.001	.194
	TI	.994	.173

a. Dependent Variable: LK

Sumber: Data Olah SPSS

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat nilai konstanta (nilai α) sebesar 31,470 dan untuk Partisipasi Masyarakat (nilai β) sebesar -0,793, Akuntabilitas (nilai β) sebesar 0,961, Transparansi Kebijakan Publik (nilai β) sebesar 0,260, Kompetensi SDM (nilai β) sebesar 0,001, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (nilai β) sebesar 0,994, Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$LK = 31,470 - 0,793PM + 0,961AT + 0,260TP + 0,001SDM + 0,994IT$$

Dari persamaan regresi linear berganda di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstan (a) memiliki nilai positif sebesar 31,470 menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi partisipasi masyarakat (PM), Akuntabilitas (AT), Transparansi Kebijakan Publik (TP), Kompetensi SDM (SDM) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) bernilai 0 satuan atau tidak mengalami perubahan, maka nilai kualitas laporan keuangan adalah 31,470 satuan.
2. Nilai koefisien regresi untuk variabel partisipasi masyarakat (PM) yaitu sebesar -0,793. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh negative (berlawanan arah) antar variabel partisipasi masyarakat dengan kualitas laporan keuangan. Hal ini artinya variabel partisipasi masyarakat mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka sebaliknya variabel kualitas laporan keuangan mengalami penurunan sebesar 0,793 satuan. Dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
3. Nilai koefisien regresi untuk variabel Akuntabilitas (AT) yaitu sebesar 0,961. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif yang menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini artinya variabel Akuntabilitas mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka sebaliknya variabel kualitas laporan keuangan naik sebesar 0,961 satuan. Dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
4. Nilai koefisien regresi untuk variabel Transparansi Kebijakan Publik (TP) yaitu sebesar 0,260. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif yang menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini artinya variabel Transparansi Kebijakan

Publik mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka sebaliknya variabel kualitas laporan keuangan naik sebesar 0,260 satuan. Dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

5. Nilai koefisien regresi untuk variabel Kompetensi SDM (SDM) yaitu sebesar 0,001. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif yang menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini artinya variabel Kompetensi SDM mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka sebaliknya variabel kualitas laporan keuangan naik sebesar 0,001 satuan. Dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.
6. Nilai koefisien regresi untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) yaitu sebesar 0,994. Nilai tersebut menunjukkan pengaruh positif yang menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini artinya variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka sebaliknya variabel kualitas laporan keuangan naik sebesar 0,994 satuan. Dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

C. Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji t (Parsial)

Tabel 6. Hasil uji t
Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	4.916	.000
	PM	-1.793	.076
	AT	2.592	.011
	TP	1.576	.118
	SDM	.005	.996
	TI	5.744	.000

a. Dependent Variable: LK

Sumber: Data Olah SPSS

Berdasarkan hasil tabel 6 uji t di atas menunjukkan pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan pembahasan seagai berikut:

1. Hasil t_{hitung} pada variabel Partisipasi Masyarakat (PM) menunjukkan nilai $-1,793 < t_{tabel}$ 1,659, dan nilai Sig. $0,076 > 0,05$, Artinya secara parsial variabel (PM) Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (LK).
2. Hasil t_{hitung} pada variabel Akuntabilitas (AT) menunjukkan nilai $2,593 > t_{tabel}$ 1,659, dan nilai Sig. $0,011 < 0,05$, Artinya secara parsial variabel Akuntabilitas (AT) berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (LK).
3. Hasil t_{hitung} pada variabel Transparansi Kebijakan Publik (TP) menunjukkan nilai $1,576 < t_{tabel}$ 1,659, dan nilai Sig. $0,118 > 0,05$, Artinya secara parsial variabel Transparansi Kebijakan Publik (TP) tidak berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (LK).
4. Hasil t_{hitung} pada variabel Kompetensi SDM (SDM) menunjukkan nilai $0,005 < t_{tabel}$ 1,659, dan nilai Sig. $0,996 > 0,05$, Artinya secara parsial variabel Kompetensi SDM (SDM) tidak berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (LK).

5. Hasil t_{hitung} pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) menunjukkan nilai 5,774 > t_{tabel} 1,659, dan nilai Sig. 0,000 < 0,05, Artinya secara parsial variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (LK).

2. Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 7. Hasil Uji F ANOVA^a

Model		F	Sig.
1	Regression	20.951	.000 ^b
	Residual		
	Total		

a. Dependent Variable: LK

b. Predictors: (Constant), TI, TP, PM, SDM, AT
 Sumber: Data Olah SPSS

Berdasarkan tabel 7 hasil uji F di atas, menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 20,951 > F_{tabel} sebesar 2,30 dan nilai Sig. 0,000 < 0,05 artinya Partisipasi Masyarakat (PM), Akuntabilitas (AT), Transparansi Kebijakan Publik (TP) dan Kompetensi SDM (SDM) Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (LK).

D. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.708 ^a	.502	.478	4.298

a. Predictors: (Constant), TI, TP, PM, SDM, AT

b. Dependent Variable: LK

Sumber: Data Olah SPSS

Berdasarkan tabel 9 hasil uji koefisien determinasi di atas menunjukkan hasil nilai *Adjusted R Square* dari hubungan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0,478 atau 47,8% yang artinya variabel independen belum menjelaskan secara keseluruhan variabel dependen dan masih ada 52,2% dari variabel lain diluar penelitian ini yang dapat menjelaskan variabel dependen.

4.1 Pembahasan Penelitian

- a Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil uji statistik bahwa Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terlihat dari hasil uji hipotesis uji t menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar -1,793 < t_{tabel} sebesar 1,659, dan nilai Sig. 0,076 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan laporan keuangan tidak dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang

berarti Hipotesis pertama tidak diterima (ditolak). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa konteks, terdapat pandangan mengenai partisipasi masyarakat yang tidak selalu memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai kontribusi yang terbatas atau bahkan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas laporan keuangan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang terjadi di pemerintah Kota Tegal masih secara umum belum memasuki tahap atau proses penyusunan laporan keuangan sehingga partisipasi masyarakat dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamsinar (2022) bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- b Akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil uji t bahwa Akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terlihat dari Hasil t_{hitung} sebesar $2,593 > t_{tabel} 1,659$, dan nilai Sig. $0,011 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan akuntabilitas dalam organisasi maka semakin baik kualitas laporan keuangan, dengan demikian hipotesis kedua diterima. Selain itu akuntabilitas sangat berperan penting dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penyusunan laporan keuangan karena adanya akuntabilitas semakin efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamsinar (2022) dalam penelitiannya bahwa analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan. Analisis variabel moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan sistem pengendalian intern mampu memoderasi akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

- c Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil uji t bahwa Hasil t_{hitung} sebesar $1,576 < t_{tabel} 1,659$, dan nilai Sig. $0,118 > 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang berarti Hipotesis ketiga tidak diterima (ditolak). Artinya peran transparansi kebijakan publik tidak dapat berjalan sesuai dengan yang dilakukan terhadap pemerintah dikarenakan adanya keterbukaan anggaran untuk masyarakat sedangkan bagi Pemerintah Kota Tegal tidak dapat mengakses secara langsung tentang anggaran terhadap masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Morasa, dkk (2018) dalam penelitian bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa adanya transparansi kebijakan publik tidak dapat mengawasi laporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

- d Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil uji t bahwa Hasil t_{hitung} sebesar $0,005 < t_{tabel} 1,659$, dan nilai Sig. $0,996 > 0,05$ yang berarti variabel kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang berarti Hipotesis keempat tidak diterima (ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin baik atau tidak baiknya Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah karena adanya sumber daya manusia yang sudah dilatih agar memiliki kompetensi dalam menyusun pelaporan keuangan yang berkualitas dan dapat mencapai tujuan organisasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2022) dalam penelitiannya kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

- e Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil uji t bahwa Hasil t_{hitung} sebesar $5,774 > t_{tabel} 1,659$, dan nilai Sig. $0,000 < 0,05$ berarti variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang berarti Hipotesis kelima diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah sudah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2022) dalam penelitiannya bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Serta sejalan pula dengan penelitian Ajhar, dkk (2015), menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

- f Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas dari uji F Simultan (bersama-sama) adalah nilai $F_{hitung} 20,951 > F_{tabel} 2,30$ dan nilai Sig. $0,000 < 0,05$ artinya Partisipasi Masyarakat (PM), Akuntabilitas (AT), Transparansi Kebijakan Publik (TP) dan Kompetensi SDM (SDM) Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) secara simultan berpengaruh terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (LK). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh lebih dari satu pengaruh atau variabel independen. Hasil ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021), yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan dengan lebih dari satu pengaruh atau variabel yang mempengaruhi. Sejalan pula dengan penelitiannya Hamsinar (2022) dalam penelitiannya bahwa analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan, dan

akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan transparansi kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis variabel moderating dengan pendekatan nilai selisih mutlak menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak memoderasi partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern mampu memoderasi akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan sistem pengendalian intern mampu memoderat transparansi kebijakan publik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh 5 variabel independen yaitu partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik, kompetensi SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai kontribusi yang terbatas atau bahkan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas laporan keuangan.
- b. Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan akuntabilitas sangat berperan penting dalam pelaksanaan pertanggungjawaban penyusunan laporan keuangan karena adanya akuntabilitas semakin efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.
- c. Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa peran transparansi kebijakan publik tidak dapat berjalan sesuai dengan yang dilakukan terhadap pemerintah dikarenakan adanya keterbukaan anggaran untuk masyarakat sedangkan bagi Pemerintah Kota tidak dapat mengakses secara langsung tentang anggaran terhadap masyarakat.
- d. Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa jika semakin baik atau tidak baiknya Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan Pemerintah perlu mengoptimisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.
- f. Partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi kebijakan publik, kompetensi SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa secara simultan mempunyai peranan yang signifikan/penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamsinar, H (2022). "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *J. Pendidik. Agama Islam Indonesia*, Vol. 3, no. 4, pp. 85–90, doi: 10.37251/jpaii.v3i4.640.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Setneg
- Karyadi, M (2019). "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek tahun 2018)," *Jurnal Ilmu Rinjani*, vol. 7, no. 2, pp. 33–46, [Online]. Available: <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/123>
- Ledo, D (2018). "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Pengendalian Internal, Penerapan Anggaran Berbasis Akrua, dan Penerapan SAP Berbasis Akrua terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah". *Jurnal Ekobis Dewantara*, Vol.1 No. 3
- Mursyidi (2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Putri, Andita Cahyasari Pradana. Akbar (2022). "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Kota Surabaya." *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, Vol. 6 No. 2.
- Rifandi, Zaizar Wiet (2019). "Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa," *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, Vol. 04, no. 01.
- S, Anggie. Rizka, Zamzani, Zamzami, and Muhammad Gowon (2021). "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kesuksesan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening," *Jurnal Akuntan Keuangan Unja*, vol. 6, no. 3, pp. 136–148, doi: 10.22437/jaku.v6i3.16111.
- Sugiyono (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta
- Wibowo, Djoko (2022) "Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tapin)," *Jurnal Kindai*, vol. 18, no. 1, 2022, doi: 10.35972/kindai.v18i1.700.
- Yuliani, Nur Laila, Agustini, Rahmawati Dwi (2016). "Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah," *Jurnal Analisis Bisnis* Vol. 14. No. 01.